

# **BAB I**

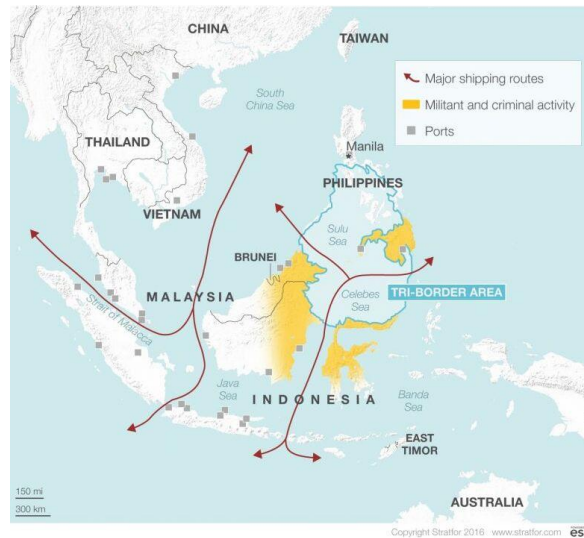
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah *Archipelagic State* (negara kepulauan) yang memiliki lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan Indonesia berdasarkan UNCLOS (*United Nation Convention on The Law of The Sea*) terkait dengan hak Indonesia atas wilayah laut yang meliputi laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), perairan kepulauan, perairan pedalaman, landas kontinen, serta perairan teritorial sepanjang 12 mil diukur dari garis bawah dan juga memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diukur dari garis tepi laut terluar sepanjang 200 mil ke arah laut lepas (Hendra Purwaka, 2015). Menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan bahwa luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia mencapai 3.110.000 km<sup>2</sup> dan luas laut teritorial mencapai 290.000 km<sup>2</sup>, luas total perairan Indonesia mencapai 6.400.000 km<sup>2</sup>, dan luas NKRI (daratan dan perairan) mencapai 8.200.000 km<sup>2</sup> dengan jumlah keseluruhan pulau 17.504 pulau besar maupun pulau (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2018).

Karena Indonesia mempunyai wilayah darat, laut, dan udara yang begitu luas, maka Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga dan memelihara keamanan serta keberlangsungan hidup lingkungan di wilayah tersebut. Wilayah laut Indonesia secara geografis serta geopolitik yang sangat strategis menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat diperhitungkan negara

lain (Hutagalung, 2017). Indonesia memiliki tiga alur laut yang disebut Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). ALKI 1 yaitu wilayah perairan Natuna, Karimata, Selat Sunda, serta Laut Cina Selatan. ALKI 2 yaitu Selat Lombok, Makassar dan Laut Sulawesi. Terakhir ALKI 3 yaitu menghubungkan jalur laut di Laut Timur dan Laut Arafurun.



**Gambar 1. Peta Jalur Laut Indonesia**

Sumber: DocPlayer.info

Keunikan wilayah maritim Indonesia merupakan dimensi kewilayahan nasional yang memiliki fungsi sebagai integritas wilayah nasional, transportasi laut domestik dan internasional, sumber daya mineral, sumber penelitian, kelestarian lingkungan, serta fungsi pertahanan, keamanan dan pelayanan. Munculnya tuntutan yang berkembang untuk kesejahteraan dan realisasi kepentingan ekonomi rakyat Indonesia, menyebabkan dibentuknya kerjasama politik dan ekonomi antara Indonesia dengan berbagai negara untuk mencapai kepentingan bersama. Namun, kerjasama tersebut tidak akan menghalangi negara-negara lain untuk saling memperebutkan sumber daya alam laut demi kesejahteraan dan kepentingan ekonomi. Sama halnya dengan negara lain, Indonesia mempunyai kepentingan di

wilayah laut, yaitu memastikan keamanan dan keberlangsungan sumber daya laut yang berkelanjutan. Kepentingan tersebut meliputi hal-hal seperti penangkapan ikan, pengelolaan SDA yang bijaksana, dan perlindungan lingkungan laut. Hal demikian dilakukan untuk tercapainya kondisi keamanan laut dan untuk menjaga keutuhan wilayah serta melindungi kepentingan nasional (Pujayanti, 2017). Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan meningkatnya hubungan internasional antar negara, baik di kawasan Asia Tenggara maupun antar negara diluar kawasan dengan berbagai kepentingannya. Dinamika politik serta ekonomi kawasan memberikan kontribusi terhadap ancaman stabilitas keamanan bagi Indonesia yang berpengaruh besar pada sumber kekuatan menengah (*middle power*) abad ke-21 (Harris et al., 2019).

Wilayah perairan Indonesia merupakan wilayah yang berbatasan dengan Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia. Wilayah perbatasan perairan Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan nasional dan menjalin kerjasama dengan negara tetangga. Wilayah perbatasan perairan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam bidang ekonomi, seperti perdagangan, pariwisata, dan industri. Posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan internasional memberikan potensi yang besar bagi Indonesia untuk berperan dalam politik internasional. Posisi geografis Indonesia sangat strategis dan memiliki kekayaan SDA yang berlimpah memberikan keuntungan besar untuk keberlanjutan pembangunan nasional, akan tetapi pada saat yang sama hal tersebut mendorong aktor-aktor tertentu untuk menggunakannya secara ilegal. Indonesia terletak pada jalur yang bernilai bagi pelayaran internasional dari bermacam negeri yakni berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, Indonesia berfungsi sebagai *Buffer Zone* antara dua benua dan dua samudera (Pujayanti, 2017).

Hampir 80% wilayah Asia Tenggara merupakan kawasan lautan. Indonesia, Malaysia, Filipina merupakan negara yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara yang terletak pada perbatasan perairan yang dikenal dengan perairan Sulu yang merupakan pusat keanekaragaman hayati laut di dunia dimana luas area perairan tersebut sekitar 900.000 km<sup>2</sup> / hampir 350.000 mil<sup>2</sup> yang merupakan sumber mata pencaharian masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan pada ketiga negara tersebut. Tetapi, perairan Sulu ialah wilayah perairan yang sangat rawan di Asia Tenggara. Perairan Sulu memiliki peran penting dalam perdagangan laut regional, serta menjadair penghubung antara Laut Cina Selatan dan Samudera Pasifik. Setiap tahunnya hampir 100 ribu kapal yang melintas pada jalur laut tersebut. Jalur laut di perairan Sulu ialah perairan paling berbahaya dan juga paling ramai setelah selat malaka. Intensitas aktivitas laut yang ramai dan banyaknya armada dagang dan armada tanker minyak yang melintasi jalur tersebut menimbulkan terjadinya berbagai ancaman di perbatasan perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina seperti penangkapan ikan secara illegal, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, pengedaran narkoba, pelanggaran wilayah, perompakan kapal dan penculikan awak kapal, serta terorisme.

Hal demikian menyebabkan tantangan dan beban besar bagi pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebab adanya kepentingan di perairan tersebut. Contohnya, kepentingan Indonesia dan Filipina yaitu kebutuhan bahan-bahan mineral dan perdagangan batu bara yang sangat bergantung pada perairan tersebut. Sedangkan kepentingan Malaysia yaitu kebutuhan minyak bumi dan perikanan

(Rustam, 2017). Indonesia memiliki kepentingan di perairan Sulu dari segi keamanan, perdagangan, maupun diplomasi regional. Nilai strategis perairan Sulu semakin tinggi seiring meningkatnya aktivitas ekspor-impor pada kawasan Indonesia bagian timur. Pada beberapa tahun terakhir, ekspor-impor di kawasan Indonesia bagian timur selalu melalui pelabuhan utama di pulau Jawa. Pengembangan jalur maritim selama ini hanya terpusat pada daerah Indonesia bagian barat, sementara maritim pada kawasan Indonesia bagian timur tertinggal. Untuk mengejar ketertinggalan serta ketimpangan, pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk merevitalisasi pelabuhan dan meningkatkan kegiatan eksklusif untuk memangkas biaya logistik (Roza, 2018).

Bagi Malaysia, perairan Sulu ini juga merupakan salah satu jalur perdagangan internasional. Banyak kapal perdagangan Internasional dari berbagai negara yang melewati perairan Malaysia di bagian timur Sabah. Malaysia memiliki kepentingan keamanan di wilayah perairan Sulu karena wilayah tersebut terletak di perbatasan wilayah Malaysia dan Filipina. Selain kepentingan keamanan, Malaysia juga memiliki kepentingan ekonomi di perairan Sulu. Malaysia memiliki perjanjian kerja sama dengan Filipina untuk memperluas perdagangan dan investasi kedua negara tersebut. Disamping itu, Malaysia mempunyai kepentingan sumber daya alam seperti perikanan dan minyak bumi di perairan Sulu. Akan tetapi, dengan sering terjadinya pembajakan terhadap kapal-kapal yang melewati perairan Malaysia, membuat kapal dagang internasional enggan melewati perairan Malaysia yang sangat dekat dengan perairan Sulu tersebut. Perompakan yang dilakukan oleh kelompok terorisme di perairan Sulu terhadap kapal Malaysia yang melintasi perairan tersebut memberikan dampak pada sektor ekonomi yang mempengaruhi

harga barang dan memberikan kerugian akibat tertundanya pengiriman barang. Selain itu, perompakan tersebut juga memberikan ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat di pesisiran pantai (Zubir, 2012). Kejahatan transnasional yang terjadi di perairan Sulu tidak hanya memberikan dampak terhadap sektor ekonomi Malaysia, tetapi juga pada sektor pariwisata. Penculikan wisatawan asing pada tahun 2013 di Lahad Datu memberikan dampak pada penurunan jumlah wisatawan asing di Malaysia. Kejadian demikian membuat wisatawan asing enggan untuk berlibur ke Malaysia karena khawatir akan keselamatan mereka (Raj, 2015).

Bagi Filipina, berbagai kejahatan transnasional yang terjadi di perairan Sulu khususnya pada perompakan kapal yang dilakukan oleh kelompok terorisme di perairan tersebut memberikan ancaman keamanan yang berakibat pada kerugian yang sangat besar terhadap Filipina. Banyak negara asing yang enggan untuk berinvestasi dan menanamkan modal untuk Filipina khususnya Filipina bagian selatan dengan alasan resiko ancaman keamanan dan ancaman teroris. Dalam kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh Filipina dengan negara kawasan, jaminan keamanan barang ekspor-impor merupakan hal yang paling utama karena jalur pelayaran Filipina menuju negara kawasan tersebut yaitu melalui Selat Luzon menuju Laut China yang merupakan jalur pelayaran yang sangat rentan terhadap serangan terorisme dan kelompok radikal menurut laporan dari *International Maritime Bureau*. Serangan terorisme dan ancaman keamanan Filipina menjadikan pertimbangan bagi negara kawasan untuk melakukan kerjasama. Hal demikian memberikan dampak terhadap menurunnya tingkat perekonomian Filipina (Zara & Raymond, 2005).

Kerentanan kejahatan maritim di kawasan perairan Sulu memberikan kerugian bagi negara yang berada disekitarnya. Oleh karena itu, negara kawasan memerlukan strategi pertahanan dan keamanan khusus, terutama untuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang dekat dengan perairan Sulu (Rantung, 2021). Dari berbagai kerentanan kejahatan maritim di kawasan perairan Sulu, perompakan bersenjata menjadi persoalan yang paling sering dihadapi dan menarik perhatian dunia internasional. Menurut laporan Biro Maritim Internasional (*International Maritime Bureau*) periode 1 Januari- 31 Desember 2021, jumlah kasus pembajakan di Asia Tenggara pada tahun 2017-2021 terhitung sekitar 271 kasus. Dari data tersebut Indonesia menempati posisi pertama kasus tertinggi yaitu terdapat 139 kasus, Malaysia 35 kasus, dan Filipina 41 kasus (Bureau, 2021).

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingginya kasus perompakan di kawasan Asia Tenggara, khususnya di perairan Sulu. Kasus perompakan yang terjadi di perairan Sulu tak hanya bermotif ekonomi namun juga memiliki motif politik. Pembajakan kapal kini tidak hanya sebatas pencurian serta intimidasi senjata, akan tetapi sudah sampai pada penyanderaan dan melakukan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh kelompok teroris (Liss, 2014). Contoh kasusnya yaitu pembajakan terhadap dua kapal Indonesia (Trugboat Brahma 12 dan Barge Anand 12) yang mengangkut 7.000 ton batu bara melalui perairan Sulu pada 26 Maret 2016 yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf dimana 10 ABK Warga Negara Indonesia di sandera (Armandhanu, 2016). Pembajakan berikutnya terjadi di Kapal Tunda PT Charles 001 serta Robby 152 milik PT. Rustianto bersaudara dengan tujuh awaknya disandera pada 20 Juni 2015 oleh kelompok bersenjata pimpinan Abu Sayyaf yang agresif di laut Sulu bagian barat daya Filipina.

Penyanderaan terjadi saat awak kapal mengangkut batu bara dari Mindanao ke Samarinda, Kalimantan Timur. Para penyanderaan menuntut uang tebusan sekitar Rp. 61-65 Miliar untuk empat dari tujuh ABK yang diculik (Gumilang, 2016) .

Pada 20 October 2016 kelompok Abu Sayyaf menculik seorang nahkoda asal Korea Selatan dan awak kapal asal Filipina. Sekitar 10 pria bersenjata dari kelompok Abu Sayyaf menaiki kapal MV Dongbang Giant menggunakan tali dari *speedboat* dan menculik nahkoda Chul Hong dan awak kapal Filipina bernama Glenn Aliandajao di kota Bangao, Provinsi Tawi-Tawi. Kapal itu sedang dalam perjalanan dari Australia menuju Korea Selatan. Awak kapal lainnya berhasil melarikan diri dan menelepon keluarganya dan melaporkan penyerangan tersebut kepada pihak yang berwenang (A. News, 2016). Selanjutnya, pada 11 September 2018 kapal penangkap ikan Malaysia menghadapi serangan di perairan laut Sulu. Pelaku penyerangan menculik dua warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam awak kapal. penyerang membawa kedua korbannya menuju Tawi-Tawi. Para penculik menuntut uang tebusan sebesar Rp. 14,3 Milyar untuk pembebasan korban (B. News, 2018).

Kelompok Abu Sayyaf merupakan sebuah organisasi militan islamis di Filipina yang muncul pada awal tahun 1990-an dipimpin Abdurajik Abu-Bakar Janjalani. Kelompok ini awalnya bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan wilayah Mindanao di Filipina dan ingin mendirikan sebuah negara islam di wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, kelompok ini menjadi terkenal karena kegiatan-kegiatan kriminalnya seperti penculikan, pemerasan, dan perdagangan narkoba. Kelompok Abu Sayyaf ini dikenal juga sebagai kelompok teroris muslim yang muncul sebagai alternatif islamis yang lebih keras terhadap gerakan politik



yang berusaha keras untuk menciptakan negara Islam merdeka di Filipina bagian selatan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu kelompok ini mengalami pergeseran ideologis dan semakin fokus pada kegiatan terorisme dan kejahatan bersenjata. (Fellman, 2011). Kelompok ini melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap kapal yang melewati perairan Sulu. Kelompok Abu Sayyaf melakukan serangan pertama di Filipina yaitu tahun 1991 dimana serangan tersebut diarahkan pada gereja, misionaris, dan masyarakat non-muslim. Kelompok Abu Sayyaf seringkali dianggap sebagai salah satu kelompok teroris paling berbahaya di dunia. Mereka sering terlibat dalam berbagai tindakan kekerasan termasuk serangan terhadap pasukan keamanan, warga sipil, dan wisatawan asing. Selain itu, Abu Sayyaf juga sering melakukan penyanderaan dan meminta uang tebusan yang besar untuk membebaskan sandera mereka (Abuza, 2005).

Kejahatan transnasional yang memberikan dampak berupa ancaman keamanan pada kawasan perbatasan perairan Indonesia, Malaysia dan Filipina lainnya adalah *illegal fishing*. Batas perairan yang tidak jelas antar negara menjadi penyebab utama di balik terjadinya *illegal fishing* di perairan Indonesia. Mengingat wilayah perbatasan ialah wilayah yang mempunyai potensi konflik yang tinggi, maka dengan meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan merupakan kewajiban bersama yang harus dilakukan oleh setiap negara dalam membangun keamanan dan perdamaian di wilayah tersebut. Penangkapan ikan tanpa izin merupakan masalah serius yang juga harus menjadi fokus pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengatasi masalah tersebut (Mariane, 2020). Berdasarkan siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan bahwa selama tahun 2021 sebanyak 163 kapal penangkap ikan ditangkap oleh KKP

dimana 111 kapal ikan Indonesia untuk kegiatan ilegal dan 52 kapal penangkap ikan asing untuk penangkap ikan secara ilegal. Kapal penangkap ikan asing yang ditangkap yaitu 25 kapal dari Vietnam, 21 dari Malaysia, dan 6 dari Filipina (Setiawan, 2021).

Selain perompakan dan *illegal fishing* kejahatan transnasional yang terjadi pada daerah perbatasan Indonesia, Malaysia, serta Filipina adalah pengedaran narkoba dan penyelundupan senjata. Salah satu negara di Asia Tenggara penghasil narkoba jenis sabu terbesar adalah Filipina. Narkoba tersebut diedarkan ke Indonesia, Australia, Amerika Serikat, hingga ke negara-negara di Eropa. Berdasarkan laporan dari intelijen Filipina, Abu Sayyaf merupakan salah satu pengedar narkoba di kawasan untuk dukungan keuangan kelompoknya. Kelompok teroris tersebut menanam marijuana di pulau Jolo dan Basilan. Hongkong merupakan tautan jaringan narkoba Abu Sayyaf yang memberikan senjata sebagai imbalan dalam pengedaran dan penjualan sabu di Filipina dan negara sekitarnya (Berry et al., 2002). Selain itu penyelundupan senjata yang terjadi di perairan Sulu yang dilakukan oleh aktor negara menjadi ancaman keamanan di kawasan karena kelompok-kelompok yang berkonflik seperti di Pattani Thailand dan Mindanao Filipina Selatan yang dapat memiliki akses langsung untuk membeli senjata secara ilegal. Sulitnya untuk mendeteksi penyelundupan senjata di wilayah perairan Sulu membuat terjadinya transaksi penjualan senjata yang terjadi di pasar gelap atau dikenal dengan "*grey area*". Pengedaran senjata ilegal tersebut disebabkan oleh produksi senjata api ilegal di kawasan dan kurangnya koordinasi antara aktor yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengamanan (Kramer, 2001a).

Ancaman keamanan di wilayah perbatasan perairan Indonesia tak hanya memberikan dampak pada keamanan wilayah, tetapi juga pada ekonomi dan politik. Banyaknya kasus kejahatan di wilayah perbatasan perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, maka diperlukan adanya peningkatan kerja sama yang mengikat ketiga negara ini meningkatkan keamanan maritim di wilayah laut. Bentuk inisiatif dalam membangun kerjasama keamanan maritim yang dilakukan oleh ketiga negara tersebut adalah adanya pertemuan *The First Trilateral Defences Minister* yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2016. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Retno Marsudi dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Disusul kehadiran Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu Dato' Sri Anifah Aman dan Panglima TNI Tan Sri Dato' Sri pejabat pemerintah Malaysia, serta Menteri Luar Negeri Filipina, yaitu Jose Rene D.Amendras dan Pelaksana Tugas Panglima Angkatan Bersenjata Caesar Taccadvar dari pejabat pemerintah Filipina.

Dalam pertemuan tersebut membahas dilema keamanan wilayah perairan masing-masing negara di perbatasan. Pertemuan tersebut menghasilkan empat perjanjian keamanan maritim di perairan Sulu. *Pertama*, Indonesia, Malaysia, dan Filipina sepakat untuk melakukan patroli bersama di sekitar perairan Sulu. *Kedua*, Indonesia, Malaysia, dan Filipina berkomitmen untuk mendiskusikan tindakan apa yang harus diambil jika terjadi kejahatan. *Ketiga*, membahas tentang pertukaran informasi secara cepat dalam situasi darurat yang terjadi di kawasan perairan Sulu. *Keempat*, membahas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) secara rinci dan jelas. Keempat kesepakatan tersebut secara teknis akan dibahas dalam pertemuan

*trilateral* ketiga negara tersebut (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016).

Dari tahun 2016 hingga 2022, Indonesia, Malaysia dan Filipina tetap berkomitmen untuk melakukan kerjasama keamanan maritim pada perairan Sulu. Hal itu dapat dilihat dengan adanya pertemuan *Trilateral Defence Ministerial Meeting* (TDMM) oleh tiga negara tersebut di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 28 Maret 2022. Dalam pertemuan tersebut Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Senior Pertahanan Malaysia Dato' Seri Hishamuddin Tun Hussein, dan Menteri Pertahanan Filipina Delfin N.Lorenzana. dalam pertemuan tersebut menghasilkan penyusunan siaran pers (*Joint Press Release*) yaitu menyepakati untuk memperkuat kerjasama antara Komando Angkatan Laut dan Patroli Angkatan Laut tiga negara (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022).

Selain upaya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina, ASEAN juga sepakat untuk meningkatkan pertukaran informasi dan melakukan kerjasama antar lembaga terkait berbagai ancaman keamanan salah satunya ancaman terorisme di perairan Sulu. ASEAN mendukung pemberantasan terorisme melalui kerjasama deteksi, investasi, pemantauan, serta pelaporan. Peran ASEAN tersebut akan diimplementasikan melalui penguatan koordinasi internasional, seperti yang dilakukan pada tahun 1999 dengan diterbitkannya *Action Plan to Eliminate International and Regional Crimes*. Upaya lain yang dilakukan oleh ASEAN adalah pembentukan jaringan antar lembaga penegak hukum terkait pemberantasan terorisme dan berbagai informasi intelijen. ASEAN juga menyelenggarakan pelatihan bagi petugas kepolisian dan badan intelijen,

mendeteksi ledakan bom, dan investasi pasca ledakan bom. Pelatihan keamanan juga diselenggarakan di bandara dan keamanan dokumen perjalanan termasuk keimigrasian serta pengendalian perbatasan. ASEAN juga bekerjasama secara regional dengan Uni Eropa dengan menempatkan isu terorisme dalam agenda ARF (*ASEAN Regional Forum*) yang berfokus pada penegakan hukum, pelatihan intelijen, menekan sumber pembiayaan terorisme, memperkuat keamanan perbatasan termasuk pergerakan orang, barang, dan dokumen (Sudirman & Sari, 2017) .

Ancaman keamanan di perairan Sulu tidak hanya memberikan dampak pada kepentingan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, tetapi juga pada kepentingan lalu lintas maritim internasional. Tingginya angka kriminalitas di perairan Sulu menimbulkan ancaman keamanan bagi negara-negara di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebagai negara yang sering menjadi korban kejahatan transnasional di perairan Sulu harus mengambil berperan dan mengoptimalkan kerjasama keamanan maritim yang telah terjalin sejak tahun 2016 untuk menjaga keamanan dan meredam ancaman kejahatan di perairan Sulu.

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul : **“KERJA SAMA TRILATERAL (INDONESIA, MALAYSIA, FILIPINA) DALAM UPAYA MENJAGA KEAMANAN WILAYAH DARI KELOMPOK ABU SAYYAF DI KAWASAN PERAIRAN SULU”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Sebagaimana sudah di paparkan sebelumnya pada latar belakang, maka penulis menarik *research question*, yaitu : ***“Bagaimana Pengaruh dari Kerja Sama Trilateral (Indonesia, Malaysia, Filipina) Dalam Upaya Menjaga Keamanan Wilayah Dari Kelompok Abu Sayyaf Di Kawasan Perairan Sulu?”***.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk mencapai tujuan penelitian yang menyeluruh, terstruktur, serta tidak meluas dari pembahasan, maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan membatasi ulasan dan analisis masalahnya pada ruang lingkup bentuk dan efektivitas dari kerja sama *trilateral* (Indonesia, Malaysia, Filipina) yang dilakukan dalam upaya menjaga keamanan wilayah di kawasan perairan Sulu. Aktor negara memainkan peran kunci dalam penelitian ini. Pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan terkait keamanan wilayah di kawasan tersebut dibantu oleh beberapa instansi pemerintahan yaitu Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti terkait dengan kerja sama *trilateral* (Indonesia, Malaysia, Filipina) dalam upaya menjaga keamanan wilayah di kawasan perairan Sulu, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi, meneliti, dan menganalisis permasalahan untuk memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk kejahatan di kawasan perairan Sulu. Hal ini akan memberikan gambaran kepada penulis tentang tindakan yang dapat dilakukan untuk permasalahan yang terjadi di kawasan perairan Sulu.

2. Untuk mengidentifikasi, meneliti, dan menganalisis bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang ditujukan untuk menjaga keamanan wilayah di kawasan perairan Sulu.
3. Untuk mengidentifikasi, meneliti, dan menganalisis kepentingan dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam melakukan kerjasama trilateral di kawasan perairan sulu.

#### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis berharap terdapat kegunaan yang disajikan pada penelitian ini guna menginformasikan untuk pihak yang berkepentingan dalam penelitian selanjutnya, adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam segi akademis, penelitian ini digunakan oleh penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hubungan Internasional dan mendapatkan gelar sarjana.
2. Dalam segi teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat dipergunakan oleh peneliti lain menjadi sumber yang dapat diterima untuk penelitian ilmiah perihal kejahatan di kawasan perairan Sulu.
3. Dalam segi praktis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam upaya menjaga keamanan wilayah dari ancaman kelompok Abu Sayyaf di kawasan perairan Sulu.